

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai lembaga kepercayaan/lembaga intermediasi masyarakat dan merupakan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Pengelolaan bank dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan tingkat likuiditas yang cukup dan rentabilitas bank yang tinggi serta pemenuhan kebutuhan modal. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank bisa memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu.

Dari segi penentuan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perkembangan bank syariah dimulai tahun 1990 dengan diselenggarakannya simposium MUI yang menyepakati pendirian Bank Syariah Indonesia. Simposium MUI ini mendorong lahirnya UU No. 7/1992 tentang perbankan yang memperkenalkan “Bank bagi hasil”. Dengan aturan pelaksana PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka lahirlah bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992 (PEBS-FEUI, 2011). Undang-undang tersebut juga telah memberikan peluang untuk dibukanya bank yang dijadikan dengan sistem syariah serta menjadi landasan hukum supaya dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh

bank syariah, dengan adanya undang-undang ini membuat industri perbankan syariah semakin diakui keberadaannya didunia perbankan nasional (Antonio, 2001).

Berdasarkan data yang diperoleh pada hari rabu tanggal 3 April 2013 dari situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/lima-bank-syariah-dengan-laba-terbesar> diperoleh informasi bahwa pada saat ini terdapat 5 Bank Syariah terbesar dengan laba melampaui 200%, yaitu:

- 1) PT Bank Syariah Mandiri, Rp 805,6 miliar
- 2) PT Bank Muamalat Indonesia, Rp 389,4 miliar
- 3) Unit Usaha Syariah Bank Permata, Rp 256,4 miliar
- 4) PT Bank Syariah Mega Indonesia, Rp 256 miliar
- 5) Unit Usaha Syariah Bank CIMB Niaga, Rp 138 miliar

Dari data diatas diketahui bahwa terdapat tiga Bank Bank Syariah dan dua unit usaha Syariah yang termasuk dalam bank terbesar apabila dilihat dari laba yang diperolehnya. Kegiatan usaha yang paling utama dari suatu bank adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari bank itu sendiri, dari deposan/nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank Indonesia, dan dari sumber lainnya. Sedangkan, kegiatan penyaluran dana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya penyaluran kredit, kegiatan investasi, dan dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka. Simpanan nasabah ini sering disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK yang berhasil dihimpun sebagian besar disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Hubungan antara DPK dan kredit ditunjukkan oleh *Financing to deposit ratio* (FDR). FDR menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank (**Kasmir, 2007**). FDR dapat menjadi indikator untuk menilai fungsi intermediasi, tingkat kesehatan bank, dan likuiditas suatu bank.

FDR dapat menjadi indikator utama dalam menilai fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi penyaluran kredit menggunakan DPK, maka fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, rendahnya penyaluran kredit menggunakan DPK menunjukkan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan lancar, karena DPK tidak disalurkan kembali kepada masyarakat, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, misalnya untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI), inventaris, dan sebagainya. FDR juga menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia memberikan penilaian kesehatan terhadap bank-bank di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Likuiditas dan FDR merupakan salah satu indikatornya.

FDR menunjukkan seberapa likuid suatu bank. Semakin tinggi tingkat FDR, semakin illikuid suatu bank. Dalam keadaan illikuid, bank akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh nasabah terhadap simpanannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat FDR, semakin likuid suatu bank. Keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (*idle fund*) yang dapat memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar.

Tingkat FDR suatu bank haruslah dijaga agar tidak menjadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Untuk itu, diperlukan suatu standar mengenai tingkat FDR.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas FDR berada pada tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan peraturan Bank Indonesia No012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar FDR pada tingkat 78%-100%.

Sanksi bagi bank di Indonesia yang tingkat FDR berada di luar kisaran 78-100%, maka BI akan mengenakan denda sebesar 0,1% dari jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% kekurangan FDR yang dialami bank. Sementara bank yang memiliki tingkat FDR diatas 100% akan diminta oleh BI untuk menambah setoran Giro Wajib Minimum (GWM) primer sebesar 0,2% dari jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% nilai kelebihan FDR yang dialami bank, dimana penambahan dana GWM primer tidak diberikan bunga. Kecuali bagi bank yang memiliki CAR diatas 14% tidak terkena penalty walau FDR diatas 100%.

Dalam kegiatan operasional bank, modal juga merupakan suatu faktor yang penting dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Modal bank dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantaranya risiko yang timbul dari kredit itu sendiri. Untuk menanggulangi kemungkinan risiko yang terjadi, maka suatu bank harus menyediakan penyediaan modal minimum. Menurut **Siamat (2003)**, fungsi utama modal bank memenuhi kebutuhan minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio*(CAR) merupakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menyediakan dana dan untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung

risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak, sejalan dengan kredit yang meningkat maka akan meningkatkan FDR itu sendiri. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan *standar Bank for International Settlement* (BIS).

Perbankan pada umumnya juga tidak dapat dipisahkan dari yang namanya risiko kredit karena tidak lancarnya nasabah untuk membayar utangnya yang disebut dengan *Non performing finance* (NPF). **Dendawijaya (2009)**, kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor dari pihak perbankan dan faktor dari pihak nasabah. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya, merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh Bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh suatu bank dimana nantinya akan mempengaruhi rasio FDR itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, tingkat NPF maksimum suatu bank adalah sebesar 5%. Apabila bank melebihi batas yang telah ditetapkan oleh BI, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

Pada laporan laba rugi sendiri terdapat dua pos utama, yakni pendapatan operasional dan biaya operasional. Jika pendapatan operasional merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional, maka biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional tersebut. Jika biaya operasional besar namun hanya menghasilkan pendapatan operasional yang sedikit, maka bank tersebut tergolong tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, di lain pihak, biaya operasional yang besar nantinya akan mengurangi jumlah laba bersih yang dapat diperoleh karena biaya operasional merupakan faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien sehingga kemungkinan suatu bank dalam dalam kondisi bermasalah semakin besar. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Di satu sisi, FDR yang semakin tinggi pada bank akan memberikan risiko yang semakin besar atas gagalnya kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat di kemudian hari. Tetapi, di sisi lain dapat meningkatkan pendapatan bank karena setiap kredit yang disalurkan akan memberikan pendapatan berupa bunga.

Alasan dipilihnya *Financing to deposit ratio* (FDR) sebagai variabel dependen adalah karena sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP, 31 Mei 2004, rasio FDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank. Nilai FDR Bank Syariah dari tahun 2008-2013 mengalami perubahan setiap periodenya.

Kondisi FDR Bank Syariah (2008-2013) dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 LDR Bank Syariah periode 2008 - 2013 dalam (%)

Tahun	Periode	Bank Syariah		
		Bsm	muamalat	Mega syariah
2008	I	91,05	95,73	90,26
	II	89,21	102,94	81,76
	III	99,11	106,39	81,16
	IV	89,12	104,41	79,58
2009	I	86,85	98,44	90,23
	II	87,03	90,27	85,20
	III	87,93	92,93	82,25
	IV	83,17	85,82	81,39
2010	I	83,93	99,47	92,43
	II	85,16	103,71	86,68
	III	86,31	99,68	89,11
	IV	82,54	91,52	78,17
2011	I	84,06	95,82	79,20
	II	88,52	95,71	81,48
	III	89,86	92,45	83,00
	IV	86,03	83,94	83,08
2012	I	87,25	97,08	84,90
	II	92,21	99,85	92,09
	III	93,90	99,96	88,03
	IV	94,40	94,15	88,88
2013	I	95,61	102,02	96,37
	II	94,22	106,44	104,18
	III	91,29	103,40	102,89
	IV	89,37	99,99	93,37

Sumber : *Laporan Pengawasam Perbankan 2008-2013* (diolah)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan rasio *Financing to deposit ratio* (FDR) pada tiga Bank Syariah terbesar yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Kenaikan dan penurunan pada setiap periodenya dapat disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan.

Prediksi terhadap *Financing to deposit ratio* (FDR) dapat dilakukan dengan melihat rasio keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing finance* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Interest Margin* (NIM) karena rasio-rasio keuangan tersebut merupakan rasio

yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*.

Kondisi CAR, NPF dan BOPO Bank Syariah pada periode penelitian 2008-2013 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan rata-rata CAR, NPF, BOPO, NIM Bank Syariah

Tahun Periode	Mega syariah			muamalat			Mandiri syariah			
	CAR	NPF	BOPO	CAR	NPF	BOPO	CAR	NPF	BOPO	
2008	I	17,56	0,41	71,56	11,46	1,61	75,76	14,73	2,63	78,01
	II	18,14	0,98	68,02	9,57	3,72	78,05	12,28	2,15	77,89
	III	15,51	0,93	75,66	11,25	3,88	78,73	11,54	2,22	78,13
	IV	13,48	0,97	89,03	10,83	3,85	78,94	12,66	2,37	78,71
2009	I	12,04	1,16	93,66	12,10	5,82	78,10	14,73	2,15	72,05
	II	11,45	0,98	86,59	11,16	3,23	86,33	14,00	1,92	73,88
	III	11,06	1,00	85,10	10,82	7,32	95,71	13,30	2,16	74,05
	IV	10,96	1,28	84,42	11,10	4,10	95,50	12,39	1,34	73,76
2010	I	12,14	1,80	81,19	10,48	5,83	87,58	12,50	0,66	74,66
	II	12,11	2,02	82,96	10,03	3,93	90,52	12,43	0,88	73,15
	III	12,36	2,60	85,92	14,53	3,36	89,33	11,47	1,45	71,84
	IV	13,14	2,11	88,86	13,26	3,51	87,38	10,60	1,29	74,97
2011	I	15,07	2,64	90,03	12,29	3,99	84,72	11,88	1,12	73,07
	II	14,75	2,14	89,49	11,57	3,57	85,16	11,24	1,14	74,02
	III	13,77	2,25	90,79	12,36	3,71	86,54	11,06	1,26	73,85
	IV	12,03	1,79	90,80	11,97	1,78	85,52	14,87	0,95	76,44
2012	I	12,90	1,53	80,03	12,07	1,97	85,66	13,91	0,86	70,47
	II	13,08	1,51	77,30	14,54	1,94	84,56	13,66	1,41	70,11
	III	11,16	1,41	76,89	13,24	1,61	84,00	13,15	1,55	71,14
	IV	13,51	1,32	77,28	11,57	1,51	84,48	13,82	1,14	73,00
2013	I	13,49	1,42	77,48	12,02	1,76	82,07	15,23	1,55	69,24
	II	13,01	2,19	81,41	13,50	1,88	82,79	14,16	1,10	81,63
	III	12,70	1,63	84,21	12,75	1,84	82,67	14,33	1,59	87,53
	IV	12,99	1,45	86,09	17,27	0,75	85,12	14,10	2,29	84,03

Sumber : *Statistik Perbankan Indonesia 2008-2013* (diolah)

Dari data diatas diketahui bahwa terjadi perubahan yang fluktuatif baik dilihat dari CAR, NPF dan BOPO yang diduga mempengaruhi perubahan FDR perbankan syariah. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan :“**Analisis Pengaruh CAR, NPF dan BOPO terhadap FDR Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2013**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing finance* (NPF), dan *Biaya Operasional Terhadap Pendapaan Operasional* (BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap *Financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Syariahdi Indonesia ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing finance* (NPF), dan *Biaya Operasional Terhadap Pendapaan Operasional* (BOPO) secara parsial berpengaruh dan variabel mana yang paling dominan terhadap *Financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Syariahdi Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing finance* (NPF) dan *Biaya Operasional Terhadap Pendapaan Operasional* (BOPO), secara bersamaan (simultan) terhadap *Financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah variable *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing finance* (NPF), *Biaya Operasional Terhadap Pendapaan Operasional* (BOPO) memiliki pengaruh dan variabel mana yang palingdominan terhadap *Financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Syariahdi Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberi kontribusi hasil penelitian empiris dalam topik pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing finance* (NPF) dan Biaya Operasional Pendanaan Operasional (BOPO) terhadap *Financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Persero di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi industri perbankan dalam mengelola kinerja perusahaannya.